

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN

Nor Ronasari¹, A. Nikhrawi Hamdie², H.M. Uhaib As'ad³

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Kalimantan MAB
Email : syariansyari@icloud.com**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti di kecamatan Banjarmasin Selatan serta melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Hasil penelitian terhadap perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diketahui dengan menggunakan 3 pertimbangan yaitu pengumpulan informasi permasalahan pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversitas pengambilan keputusan. Pengumpulan informasi permasalahan pembangunan dilihat dari kehadiran dan keaktifan masyarakat pada pelaksanaan musrenbang dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap pembangunan. Penyaluran aspirasi masyarakat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan. Sedangkan diversitas pengambilan keputusan dilihat dari perbedaan keputusan yang diambil pemerintah daerah untuk setiap wilayah di Kecamatan Banjarmasin Selatan sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

Kata Kunci : Perencanaan Partisipatif, Pembangunan

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the participatory planning in the development process in district Banjarmasin Selatan district of Banjarmasin City. The research method used is a qualitative research methods are purely descriptive to clearly give an overview about the issues examined in the Banjarmasin Selatan as well as conducting interviews with some of the informants.

The results of research on participatory planning in the development process in district Banjarmasin Selatan, Banjarmasin City in mind using three considerations is information gathering problems of development, channeling the aspirations of the community, and diversitas decision making. Information collection development problems seen from the presence and activity of the community on the implementation of the musrenbang in delivering advice and critique of development. Channeling the aspirations of society as seen from the transparency that was done by the local government as a retailer of aspiration in enhancing development. Whereas the decision-making diversitas viewed from the difference in the decision taken to any local government area in district Banjarmasin Selatan in accordance with the needs of the region.

Key words : Participatory planning, development

PENDAHULUAN

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau

dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses

Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam proses mekanisme perencanaan pembangunan bukan hanya sekedar antusias kehadiran masyarakat dalam Musrenbang, tetapi kemudian bagaimana kepentingan mereka direspon oleh pemerintah. Maka wajar saja bila muncul pertanyaan apakah selama ini pelaksanaan Musrenbang hanya sekedar rutinitas dari system yang harus atau wajib dilaksanakan atau Musrenbang telah menghasilkan sesuatu yang berpihak pada masyarakat.

Masalah yang kemudian ditemukan

oleh peneliti dilapangan adalah, dalam mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah antusias partisipasi masyarakat dalam kehadiran cukup maksimal. Dari data yang didapat oleh peneliti kehadiran peserta Musrenbang dari tahun 2019 ada 150 orang. Akan tetapi ketika proses pemberian masukan-masukan dalam rangka pembangunan daerah masyarakat selalu dihadapkan pada acara seremonial dimana masukan tersebut diberikan kepada pemerintah dalam bentuk proposal atau dokumen kegiatan yang anggarannya telah ditentukan kemudian masyarakat hanya akan mempercayakan hasilnya kepada pemerintah kecamatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap

variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti data yang diperoleh

Pembahasan Hasil Penelitian Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan

1 Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi dilakukan oleh pihak pemerintah tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan melalui kegiatan musrenbang. Dalam mengumpulkan informasi mengenai program yang akan di rancang dalam pembangunan salah satunya dapat dilakukan pada proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam hal ini pelaksanaan Musrenbang, di mulai dari menyiapkan informasi mengenai

penyelenggaraan musrenbang tahun2019 yang kemudian camat menyampaikan kepada lurah untuk membentuk panitia penyelenggara dan membuat jadwal pelaksanaan musrenbang untuk di sampaikan ke warga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah baik kota maupun kecamatan telah melaksanakan salah satu hal penting yang semestinya di lakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yaitu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa.

Menghadirkan masyarakat pada kegiatan musrenbang merupakan salah satu langkah awal dalam menyusun perencanaan pembangunan di suatu daerah. Masyarakat dihadirkan dengan tujuan mendapatkan informasi permasalahan pembangunan di

lingkungan mereka sehingga pada saat kebijakan diterbitkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Aparatur pemerintah yang hadir juga harus memberikan pendapat mereka mengenai pembangunan seperti apa yang sebaiknya dilakukan pada lingkungan tertentu agar program pembangunan tepat sasaran dan dana untuk pembanguna tidak terbuang percuma.

Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah akan lebih mencerminkan proses demokrasi apabila masyarakat telah ditentukan dapat turut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat pada tingkat kehadiran masyarakat sebagai peserta dalam pelaksanaan musrenbang sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup antusias mengenai pelaksanaan musrenbang. Mereka mengempatkan diri untuk menghadiri acara musrenbang dan memberikan pendapat, saran maupun kritikan mereka terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi di wilayah mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam membangun bangsanya, salah satunya adalah dengan turut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan.

Informasi yang didapatkan dalam kegiatan musrenbang disampaikan dalam bentuk usulan program-program pembangunan untuk dimasukkan kedalam daftar rencana pembangunan di daerah tersebut. berikut daftar usulan kegiatan prioritas Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun2019 yang akan dilaksanakan pembangunannya di

Tahun 2020 :

2 Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Selain mengumpulkan banyak informasi mengenai permasalahan pembangunan, Amien (2005) juga berpendapat bahwa perencanaan partisipatif merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam membangun bangsa ini ditentukan oleh transparansi dalam pengambilan keputusan. Penyaluran aspirasi bukan hanya sekedar memberikan ‘perasaan’ bahwa mereka diperhatikan, tetapi dengan demikian masyarakat akan mau berpartisipasi dalam pembangunan. Aspirasi masyarakat disalurkan oleh pemerintah daerah tingkat kecamatan/kelurahan melalui kegiatan musrenbang dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Kecamatan Banjarmasin Selatan melaksanakan musrenbang sebagai salah satu kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya untuk menampung

aspirasi masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Penyaluran aspirasi masyarakat ini dimulai dari aktifnya masyarakat dalam kegiatan musrenbang dengan memberikan saran atau apapun yang menjadi kepentingan dalam urusan pembangunan di lingkungannya.

Di Kecamatan Banjarmasin Selatan sendiri telah memperlihatkan bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat dihimpun dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunannya sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pegawai Kecamatan Banjarmasin bagian Pemerintahan

Akan tetapi jika ingin melihat apakah aspirasi masyarakat tersalurkan dengan benar, hasil dari musrenbang itu sendiri harus mencerminkan apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi

prioritas masyarakat begitu pun dengan pelaksanaannya. Namun di kecamatan Banjarmasin Selatan sendiri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan terdapat beberapa kelurahan yang hasil musrenbangnya memang berasal dari saran dan masukan masyarakat akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan pada musrenbang

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah sebenarnya masih belum percaya sepenuhnya kepada masyarakat mengenai perencanaan yang mereka buat apakah benar dibutuhkan oleh masyarakat atau hanya sekedar keinginan semata, selain itu juga terkadang pemerintah masih mempertimbangkan pembangunan yang mana didahulukan dan sangat diperlukan sehingga tidak semua masukan dari masyarakat bisa di tindak lanjuti.

Berdasarkan wawancara bersama

lurah Murung Raya diwilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dapat diketahui bahwa penyaluran aspirasi masyarakat melalui perencanaan partisipatif masih belum efektif di Kecamatan Banjarmasin Selatan, sehingga Kecamatan Banjarmasin Selatan masih belum bisa dikatakan belum sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaan Musrenbang yang merujuk pada perencanaan partisipatif. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya wilayah di kecamatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya dalam pembangunan.

3 Disersivitas Pengambilan Keputusan

Program yang akan dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Selatan cukup beragam, karena di setiap kelurahan di wilayah tersebut pemerintah menempatkan program yang benar dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan usulannya dan program yang sebenarnya tidak

termasuk dalam daftar usulan serta program tersebut tidak terlalu dibutuhkan atau bahkan tidak dibutuhkan oleh masyarakat dilingkungan tersebut. Berkaitan dengan diversivitas pemerintah dalam mengambil keputusan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Banjarmasin Selatan belum dapat dikatakan memihak sepenuhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya koordinasi, transparansi, dan kepercayaan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu dari perencanaan pembangunan itu sendiri hingga pada tahap pelaksanaan program perencanaan pembangunan tersebut.

PENUTUP

Proses perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Banjarmasin Selatan telah dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan serta masyarakat

dalam hal ini sebagai peserta. Pengumpulan informasi dari peserta yang menghadiri musrenbang telah mencakup mengenai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan kegiatan musrenbang sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pembangunan di wilayahnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan untuk di beberapa wilayah kelurahan. 4 Karena pemerintah lebih memprioritaskan wilayah mana yang akan dikembangkan secara penuh sehingga pembangunan di Kecamatan Banjarmasin Selatan masih belum merata. Hal inilah yang menyebabkan terdapat wilayah yang bahkan pembangunan infrastruktur transportasinya yang luput dari perhatian pemerintah. Hal ini membawa penulis menyimpulkan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah di Kecamatan Banjarmasin Selatan masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana perencanaan partisipatif yang sesungguhnya, dalam arti masyarakat

masih belum mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk membangun wilayahnya, masih terdapat unsure politik dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan sehingga masih terdapat wilayah yang bisa dikategorikan kurang mendapatkan perhatian ataupun wilayah yang mendapat perhatian tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah menunjukkan proses yang partisipatif akan tetapi dalam perealisasi hasil perencanaan tersebut masih belum memihak secara penuh kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adisasmita, Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Afifuddin, 2012, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.
- Amien, Mappadjantji, 2005, *kemandirian lokal "Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru"*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sugiyah, 2010, *Memahami Desa Secara Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Coralie Bryant, Louise G. White, 1990,

Manajemen Pembangunan, LP3ES, Jakarta.

- Dwiyanto, Agus, 2014, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P.Drs, 2013, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, CV. Haju Masagung, Jakarta.
- Kunarjo, 2012, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 2017, *Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Nazir, M. 2013 *Metode penelitian*, Bogor, Ghaia. Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta Jakarta.
- Pohan, M H. 2003, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Pokok-pokok pemikiran*. Lokakarya penguat peran perguruan Tinggi dalam pembangunan perencanaan Partisipatif Jakarta Tanggal 23 Oktober 2003, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2015, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siagian, 2013, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*.
- Siagian, S.P, 2013, *Administrasi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi, 2012, *Membangun masyarakat Memberdayakan rakyat*.
- Aditama T arigan, Robinson, 2015, *Perencanaan pembangunan wilayah*.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2019, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Peraturan Undang-undang**
UU No.25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (SPPN)

UU No.32 Tahun2004tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007Tentang Organisasi PerangkatDaerah.

PeraturanDaerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

PeraturanWalikota Banjarmasin Nomor 49

Tahun2008 tentangTugas Pokok dan Fungsi dan Tata KerjaKecamatan Kota Banjarmasin.

Jurnal

Fadil,Fathurrahman.2013.*Partisipasi Masyarakat DalamMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal.Vol.2, No.2. (diakses pada tanggal 28 Oktober 2019)